



RESHUFFLE KETUJUH PRABOWO: MISTERI MENTERI YANG KEHILANGAN KURSI

Pratikno, Agus Gumiwang dan Djamari Chaniago Dicoret, Bahlil Rangkap Jabatan

Kejutan 1 Oktober! Telepon mendadak, pesan singkat, hingga perpindahan jabatan dalam hitungan jam mewarnai reshuffle ketujuh Kabinet Merah Putih, Kamis (1/10/2026). Sejumlah pejabat mengaku baru mengetahui penugasan barunya beberapa jam sebelum pelantikan. Arrmanatha Nasir ditelepon ketika sedang bersama Sugiono di Kementerian Luar Negeri. Sarmuji mendapat kabar pada pagi hari sebelum dilantik sebagai Menteri Perindustrian. Sedangkan Suyudi Ario Seto mengetahui pencalonannya sebagai Kapolri pada hari yang sama dan langsung menjalani uji kelayakan di DPR. Di antara mereka, ada nama-nama yang benar-benar baru masuk pemerintahan, seperti Sarmuji, Drajad Hari Wibowo, Nurkholisoh Ibnu Aman, Luky Alfirman, Muhammad Saleh Mustafa dan Irwan Meilano. Ada pula pejabat yang sekadar berpindah kursi. Diantaranya Sugiono menjadi Menko PMK, Dudung Abdurachman bergeser dari KSP ke Menko Polkam, sedangkan Listyo Sigit Prabowo berpindah dari Kapolri menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Bahkan, Bahlil Lahadalia mendapat tambahan tugas sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap menjabat Menteri ESDM. Di sisi lain, reshuffle juga berarti berakhirnya masa tugas bagi sejumlah nama. Pratikno, Agus Gumiwang Kartasasmita dan Djamari Chaniago kehilangan posisi menteri dan hingga pelantikan berakhir belum diumumkan mendapat jabatan baru. Bila dicoret permanen pun, alasan pemicunya masih menjadi misteri. Sementara Luky Alfirman membawa cerita berbeda. Setelah sebelumnya dicopot Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Dirjen Anggaran, ia kini kembali ke Kementerian Keuangan sebagai Wakil Menteri Keuangan. Reshuffle kali ini tak hanya soal siapa yang datang dan pergi, tetapi juga siapa yang kembali. BERSAMBUNG HAL.11



ARRMANATHA CHRISTIAWAN NASIR

- Baru: Menteri Luar Negeri
- Sebelumnya: Wakil Menteri Luar Negeri
- LHKPN: Rp16,27 miliar



BAHLIL LAHADALIA

- Baru: Menko Hilirisasi & Transisi Energi, merangkap Menteri ESDM
- Sebelumnya: Menteri ESDM; Ketum Golkar
- LHKPN: Rp344,42 miliar



LUKY ALFIRMAN

- Baru: Wakil Menteri Keuangan
- Sebelumnya: Dirjen Anggaran Kemenkeu
- LHKPN: Rp52,83 miliar



SUYUDI ARIO SETO

- Baru: Kapolri
- Sebelumnya: Kepala BNN
- LHKPN: Rp5,85 miliar



NURKHOLISOH IBNU AMAN

- Baru: Wakil Menteri Keuangan
- Sebelumnya: Peneliti senior Bank Indonesia
- LHKPN: Rp4,70 miliar



MUHAMMAD SALEH MUSTAFA

- Baru: Wakil Menteri Pertanian
- Sebelumnya: Wakasad
- LHKPN: Rp13,10 miliar



DEDI PRASETYO

- Baru: Kepala Badan Reforma Agraria Nasional
- Sebelumnya: Wakapolri
- LHKPN: Rp11,17 miliar



DRAJAD HARI WIBOWO

- Baru: Wamenko Perekonomian
- Sebelumnya: Ekonom; mantan anggota DPR dan komisaris PNM
- LHKPN: Rp50,92 miliar



IRWAN MEILANO

- Baru: Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan
- Sebelumnya: Guru Besar & Wakil Rektor ITB
- LHKPN: Belum terverifikasi

SUGIONO

- Baru: Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)
- Sebelumnya: Menteri Luar Negeri (Menlu) RI
- LHKPN: Rp13,15 miliar

(Gantikan Pratikno)

MUHAMMAD SARMUJI

- Baru: Menteri Perindustrian
- Sebelumnya: Anggota DPR; Sekjen Golkar
- LHKPN: Rp14,93 miliar

(Gantikan Agus Gumiwang Kartasasmita.)

DUDUNG ABDURACHMAN

- Baru: Menko Hilirisasi & Transisi Energi, merangkap Menteri ESDM
- Sebelumnya: Menteri ESDM; Ketum Golkar
- LHKPN: Rp344,42 miliar

(Gantikan Djamari Chaniago)

Lanjutan di Hal 11...



WAJAH-WAJAH DI BALIK RESHUFFLE 1 OKTOBER

INSENTIF DAPUR MBG TAK LAGI RP6 JUTA/ HARI, MULAI 5 OKTOBER JADI RP2.000/PORSI

Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mulai 5 Oktober 2026, insentif yang sebelumnya dipatok rata Rp6 juta per hari tidak lagi diberikan secara flat. Besarannya dihitung berdasarkan jumlah porsi makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat.

FAKTA TERBARU MBG

480 SPPG

Masuk Wilayah 3T

2 Oktober 2026

BGN mulai mengaktifkan SPPG secara serentak di Indonesia Timur.

480 SPPG

Total dapur yang masuk tahap aktivas

16 Provinsi

Papua hingga Nusa Tenggara dan Sulawesi menjadi sasaran.

116 Kabupaten/Kota

Wilayah yang tercakup dalam tahap aktivasi ini

16 Provinsi Sasaran

• Papua Pegunungan • Papua Tengah
• Papua Selatan • Papua • Sulawesi Tengah
• Papua Barat Daya • Papua Barat
• Maluku Utara • Maluku • Sulawesi Utara
• Gorontalo • Sulawesi Barat • Sulawesi Tenggara • NTB • Sulawesi Selatan • NTT

Komposisi Dapur

• 211 SPPG → mitra mandiri
• 269 SPPG → SPPG terpencil



MBG menjangkau daerah-daerah terpencil, termasuk Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. (ist)

Peraturan BGN Nomor 13 Tahun 2026 tentang Hari Pelayanan Efektif Program Makan Bergizi Gratis dan Pemberian Insentif Ketersediaan dan Mutu Layanan SPPG. BGN menyatakan besaran insentif akan mempertimbangkan jumlah porsi, kapasitas masing-masing dapur, serta jumlah hari operasional SPPG.

Dengan skema tersebut, besaran yang diterima setiap dapur tidak otomatis sama. SPPG yang melayani 3.000 porsi, misalnya, secara hitungan memperoleh Rp6 juta insentif. Namun dapur yang hanya melayani 2.000 porsi mendapat Rp4 juta. Untuk 2.500 porsi, insentifnya menjadi Rp5 juta.

Perubahan ini sekaligus menjawab persoalan yang sebelumnya dikemukakan Sudaryono. Pada 3 September 2026, ia menilai pemberian Rp6 juta secara flat tidak mencerminkan perbedaan beban kerja antar-SPPG.

"Ada dapur bikin 3.000 porsi, ada yang 2.000 porsi, ada yang dapur 2.500 porsi, dibayar semua Rp6 juta, kan enggak adil dong," kata Sudaryono ketika itu.

Dalam penjelasan terbaru, Sudaryono menyebut perubahan tersebut diarahkan pada prinsip kewajaran, kebenaran, efisiensi, dan keadilan.

"Ini bukan lagi pemerataan semuanya sama, tetapi ini lebih ke arah asas kewajaran, asas kebenaran, dan asas juga lebih efisien," kata Sudaryono dalam keterangan pers, Kamis (1/10). Ia menambahkan, jumlah penerima manfaat yang berbeda juga menjadi dasar perbedaan besaran insentif.

BGN juga ingin menghindari ketimpangan beban kerja antar-dapur. SPPG dengan kapasitas kecil tidak

diharapkan menerima terlalu banyak penerima manfaat hingga mengalami kelebihan beban, sementara dapur berkapasitas besar tidak justru kekurangan penerima manfaat.

"Kami berharap tidak ada lagi kemudian rebutan penerima manfaat, tidak lagi kemudian ada dapur yang kecil kemudian menjadi overload karena terlalu banyak penerima manfaatnya," ujar Sudaryono. Ia juga mengatakan dapur besar tidak seharusnya mendapatkan jumlah penerima manfaat yang terlalu sedikit sehingga kapasitasnya tidak optimal.

Perubahan insentif tersebut berkaitan dengan struktur anggaran MBG sebesar Rp15.000 untuk setiap penerima manfaat. Dari angka itu, BGN menjelaskan Rp10.000 dialokasikan untuk makanan, Rp3.000 untuk operasional dapur, dan Rp2.000 untuk insentif ketersediaan dan mutu layanan SPPG.

Artinya, Rp2.000 bukan tambahan di luar alokasi Rp15.000 per porsi, melainkan bagian dari struktur anggaran tersebut.

Selain jumlah porsi, insentif juga mengikuti hari pelayanan efektif. SPPG hanya memperoleh insentif ketika dapur benar-benar beroperasi dan memberikan layanan MBG kepada penerima manfaat.

Konsekuensinya, SPPG yang tidak beroperasi karena terkena suspensi tidak memperoleh insentif. Ketentuan serupa berlaku ketika layanan MBG berhenti karena hari libur nasional atau sekolah diliburkan akibat kondisi tertentu, termasuk bencana alam maupun kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan pembelajaran dilakukan secara daring.

"Sehingga dapur SPPG itu tidak melayani penerima manfaat dalam pemberian MBG sehingga insentif juga

tidak diberikan," kata Sudaryono, sebagaimana dikutip Kontan.

BGN selanjutnya akan menyesuaikan penetapan penerima manfaat dengan kapasitas masing-masing SPPG. Jumlah peserta didik maupun kelompok penerima manfaat lain di wilayah layanan dapur akan menjadi bagian dari pertimbangan tersebut.

"Tidak ada lagi juga dapur yang besar itu kemudian jadi kurang penerima manfaat, kurang optimal karena mendapatkan porsi yang lebih kecil," kata Sudaryono.

480 Dapur Diaktifkan di 16 Provinsi

Badan Gizi Nasional (BGN) mulai memperluas layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah yang selama ini menghadapi persoalan akses dan gizi. Sebanyak 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan diaktifkan serentak mulai Jumat, 2 Oktober 2026, di 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota di Indonesia Timur.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan aktivasi tersebut diprioritaskan bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi.

"Pada Jumat, 2 Oktober ini, kami akan melaksanakan aktivasi dapur SPPG yang siap beroperasi di wilayah 3T, wilayah yang stuntingnya tinggi dan wilayah yang stuntingnya tinggi sekali. Kita mulai dari wilayah Timur Indonesia," ujar Sudaryono di Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Sebanyak 480 SPPG yang masuk dalam tahap aktivasi terdiri atas 211 SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG terpencil. Ke-480 dapur tersebut tersebar di Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, Sulawesi Tengah, Papua Barat Daya, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

Aktivasi dilakukan serentak dengan jajaran BGN ditempatkan di sejumlah provinsi untuk memastikan proses berjalan sesuai tahapan. Sudaryono dijadwalkan berada di Maluku, sedangkan Wakil Kepala BGN, para deputy, serta pejabat eselon II ditugaskan di wilayah lainnya. (tin, ant, kum/dya)

ALASAN DPR MENDADAK RESTUI SUYUDI KAPOLRI

Pergantian pucuk pimpinan Polri berlangsung dalam hitungan jam. Surat Presiden (Surpres) mengenai pemberhentian Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan pengajuan Komjen Pol. Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri diterima DPR pada Rabu (30/9/2026). Sehari kemudian, Kamis (1/10), Suyudi menjalani uji kelayakan dan kepatutan, direstui DPR secara aklamasi, lalu dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kapolri.

Kecepatan proses tersebut memunculkan pertanyaan mengenai alasan DPR menggelar fit and proper test Suyudi dalam waktu sangat singkat. Ketua DPR Puan Maharani menyebut tidak ada persoalan dalam proses tersebut karena seluruh tahapan tetap mengikuti mekanisme dan tata tertib DPR.

"Dari laporan yang kami terima bahwa tidak ada hal-hal yang dipermasalahkan di Komisi III karena memang Komisi III yang melakukan fit and proper dan alhamdulillah secara aklamasi tadi di Komisi III menyetujui untuk penetapan pencalonan calon Kapolri yang baru," kata Puan kepada wartawan, Kamis (1/10/2026).

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan, DPR menerima Surpres bernomor R57/Pres/09/2026 pada 30 September 2026. Surat tersebut berisi usulan pemberhentian Listyo Sigit dari jabatan Kapolri sekaligus pengangkatan Suyudi sebagai penggantinya.

Setelah surat diterima, Badan Musyawarah DPR menugaskan Komisi III melakukan uji kelayakan terhadap Suyudi. Rapat Komisi III kemudian dibuka sekitar pukul 09.10 WIB pada Kamis pagi.

Proses itu berlangsung singkat. Setelah pemaparan dan pendalaman, Habiburokhman meminta persetujuan anggota Komisi III.

"Kita langsung saja, apakah secara aklamasi dapat disetujui?" tanya Habiburokhman. Seluruh anggota DPR yang hadir menjawab setuju.

Hasil Komisi III kemudian dibawa ke rapat paripurna. DPR kembali menyetujui pengangkatan Suyudi sebagai Kapolri.

Dengan demikian, rangkaian penggantian Kapolri yang biasanya membutuhkan sejumlah tahapan panjang berlangsung hanya dalam satu hari setelah Surpres diterima DPR.

Puan mengatakan cepatnya proses tidak berarti DPR melewati prosedur. Menurut dia, selama seluruh tahapan sesuai mekanisme dan tata tertib, proses dapat dilakukan tanpa harus memakan waktu lama.

Penjelasan tersebut menjadi dasar DPR ketika proses pergantian Kapolri berlangsung hampir tanpa jeda. Apalagi, Suyudi merupakan calon tunggal yang diajukan Presiden Prabowo.

Suyudi juga bukan figur yang sama sekali baru di lingkungan kepolisian.



Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto berjabat tangan dengan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026). (REUTERS.ist)

Sebelum diajukan sebagai Kapolri, ia menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Sebelumnya, Suyudi pernah menjabat Kapolda Banten.

Enam Program Dipaparkan

Dalam uji kelayakan, Suyudi memaparkan enam agenda transformasi Polri. Salah satunya adalah penguatan kelembagaan melalui penyederhanaan struktur organisasi.

Ia menginginkan Mabes Polri memiliki struktur yang lebih strategis dan ramping, Polda yang profesional dan suportif, Polres sebagai satuan operasional dasar yang kuat, serta Polsek yang tangguh dan dekat dengan masyarakat.

"Struktur ini dan lapisan persetujuan yang tidak memberi nilai tambah ditelaah untuk disederhanakan," kata Suyudi.

Agenda berikutnya menyangkut pembinaan sumber daya manusia dan rekrutmen. Suyudi mengatakan pembenahan harus mencakup seluruh siklus SDM, mulai dari perencanaan, rekrutmen, pendidikan, penempatan, karier, kompetensi, kesejahteraan hingga masa purna tugas.

Suyudi juga membawa gagasan "Polisi Bersama Masyarakat" sebagai doktrin kepemimpinannya. Masyarakat ditempatkan sebagai pusat orientasi tugas kepolisian. Ia mengatakan pembenahan harus dilakukan dengan keberanian melihat kekurangan institusi sekaligus mempertahankan capaian yang telah dibangun pimpinan sebelumnya.

Salah satu isu yang mendapat

perhatian dalam uji kelayakan adalah fenomena "no viral, no justice". Suyudi menyatakan ingin menghilangkan kondisi ketika perkara baru mendapat perhatian setelah menjadi viral di mediasosial.

"Pelapor berhak mengetahui perkembangan yang dapat dibuka tanpa harus mencari akses informal kepada penyidik," kata Suyudi.

Ia menyebut fenomena tersebut sebagai salah satu dari sembilan kegelisahan publik terhadap Polri. Menurut Suyudi, laporan masyarakat merupakan bentuk harapan agar negara hadir sehingga pelapor berhak mendapatkan kepastian mengenai perkembangan perkara.

Suyudi juga mengatakan kritik berbasis fakta dari masyarakat harus dipandang sebagai peringatan dini bagi institusi kepolisian untuk mengetahui persoalan yang perlu segera diperbaiki.

Ada pula perubahan simbolik dalam proses pergantian tersebut. Listyo Sigit tidak mendampingi Suyudi dalam uji kelayakan di DPR, berbeda dengan pengalaman Listyo sendiri ketika menjadi calon Kapolri pada 2021. Listyo menjelaskan ketidakhadirannya karena sedang mengikuti upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur, bersama Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

"Ya kita tadi lagi ada kegiatan upacara toh," ujar Listyo, Kamis (1/10).

Listyo memang berada di Lubang Buaya ketika DPR mulai memproses pemberhentiannya. Setelah itu, ia mendapatkan posisi baru sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

PROFIL KAPOLRI SUYUDI ARIO SETO

- **Nama:** Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto
- **Lahir:** Pandeglang, Banten, 14 Juli 1973
- **Usia:** 53 tahun
- **Almamater:** Akademi Kepolisian (Akp) 1994
- **Spesialisasi:** Reserse
- **Jabatan terakhir:** Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)
- **Jabatan strategis sebelumnya:**
 - Kapolres Metro Jakarta Pusat
 - Dirreskrim Polda Metro Jaya
 - Wadirtipidsiber Bareskrim Polri
 - Wakapolda Metro Jaya (2023)
 - Kapolda Banten (2024)
 - Kepala BNN (2025)
- **Kini:** Disetujui DPR sebagai Kapolri menggantikan Listyo Sigit Prabowo pada 1 Oktober 2026.
- **LHKPN 2025:** Rp5,847 Miliar
- **Laporan disampaikan 28 Maret 2026,** saat Suyudi menjabat Kepala BNN.

Pergantian tersebut sekaligus menutup masa kepemimpinan Listyo yang dimulai sejak Januari 2021 dan berlangsung hampir enam tahun.

Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyebut pergantian pucuk pimpinan Polri sebagai bagian dari regenerasi organisasi.

"Pergantian Kapolri adalah sebuah kewajaran. Sebuah organisasi sebesar Polri membutuhkan penyegaran dengan melakukan regenerasi kepemimpinan," kata Bambang.

Setelah resmi menjadi Kapolri, Suyudi menyatakan akan melakukan konsolidasi internal dan "belanja masalah" di seluruh jajaran Polri untuk memetakan persoalan yang harus segera diselesaikan.

Narkoba menjadi salah satu perhatian utamanya. Suyudi menyoroti persoalan peredaran narkotika di dalam lapas sekaligus masalah kelebihan kapasitas penghuni.

"Kita tahu bahwa lapas itu over capacity. Kemudian juga peredaran mungkin narkotika di dalam ini menjadi satu hal yang selalu menjadi momok. Ini perlu penanganan khusus," kata Suyudi seusai pelantikan di Istana Negara.

Ia mengatakan pendekatan rehabilitasi dan edukasi perlu diperkuat, khususnya bagi pengguna narkotika. Selain narkoba, Suyudi menyebut Presiden Prabowo memberi perhatian terhadap penyelundupan dan judi online. (gus,ust,ant,rla/dya)

SIDANG IJAZAH GIBRAN: SAKSI UNGKAP DUGAAN PASAL TITIPAN DI PKPU 19/2023

Persidangan gugatan keabsahan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK) memunculkan dugaan adanya penyelipan norma dalam proses penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023. Kesaksian mantan anggota KPU RI, I Gusti Putu Artha, membuka kemungkinan adanya ketentuan yang masuk ke dalam draf regulasi tanpa melalui proses konsultasi dan sinkronisasi sebagaimana mestinya.

Dugaan itu berkaitan dengan Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 yang mengecualikan kewajiban menunjukkan bukti kelulusan sekolah menengah atas (SMA) bagi calon presiden dan wakil presiden lulusan sekolah asing di luar negeri yang telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Ketentuan tersebut menjadi salah satu pokok gugatan sejumlah pihak yang mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran dalam Pilpres 2024.

Dalam sidang ketiga perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Rabu (30/9/2026) malam, Putu Artha menjelaskan bahwa terdapat dua ruang kerja berbeda di lingkungan KPU, yakni jajaran komisioner dan kesekretariatan jenderal. Menurut dia, pekerjaan teknis penyusunan regulasi dan administrasi berada di bawah koordinasi kesekretariatan.

Ia mengungkapkan, dalam pengalamannya sebagai anggota KPU periode 2007-2012, pernah menemukan draf peraturan maupun surat edaran yang memuat ketentuan yang perlu dicermati sebelum ditandatangani pimpinan lembaga.

"Kadang ada satu dua orang teman-teman di Kesekjenan (KPU RI) yang nakal yang memang dititipi," kata Putu dalam persidangan.

Putu menjelaskan, komisioner tidak selalu terlibat langsung dalam pemeriksaan teknis dokumen persyaratan calon. Proses tersebut biasanya ditangani kelompok kerja (pokja) yang berada di bawah kesekretariatan.

"Dalam konteks kasus yang dibicarakan sekarang ini, tim sekretariat inilah yang kemudian masuk dengan koordinator pokja dan tim teknisnya, mengidentifikasi problem-problem yang krusial," ujarnya.

Terkait Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023, Putu menyebut terdapat dua kemungkinan proses masuknya ketentuan tersebut ke dalam regulasi.



Suasana sidang perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Rabu (30/9/2026) malam. (Dok)

Pertama, norma itu memang telah disepakati dalam proses sinkronisasi dan konsultasi dengan DPR. Kedua, ketentuan tersebut masuk pada tahap akhir penyusunan draf.

"Atau kemungkinan yang kedua, tidak ada di sinkronisasi, tidak ada di konsultasi, tetapi ia nyelip masuk ke sana," kata Putu.

Kesaksian tersebut belum dengan sendirinya membuktikan adanya penyelundupan pasal dalam penyusunan PKPU. Hal itu masih menjadi bagian dari dalil pemohon yang harus dinilai bersama bukti dan keterangan lain dalam persidangan.

Pemohon Minta Gibran Dihadirkan

Di tengah agenda pembuktian, kuasa hukum pemohon, Bambang Widjojanto, juga meminta majelis hakim memanggil sejumlah pihak untuk memberikan keterangan secara langsung. Mereka adalah Gibran Rakabuming Raka, Menteri Pendidikan, dan Menteri Hukum.

Permintaan tersebut disampaikan melalui surat tertanggal 28 September 2026.

"Ada saudara Gibran Rakabuming Raka, Menteri Pendidikan dan Menteri Hukum. Sudah ada suratnya, kami

mohon dipertimbangkan untuk dipanggil," ujar Bambang.

Wakil Ketua MK Saldi Isra yang memimpin persidangan menyatakan majelis telah menerima surat tersebut. Namun, permintaan pemanggilan belum diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

"Ya kami sudah terima surat itu tapi belum dibahas, nanti akan dibahas di RPH yang terpisah," kata Saldi.

Bambang sempat menyampaikan kekhawatiran agar permohonan tersebut tidak terlewat dalam pembahasan internal hakim. Saldi kemudian memastikan pembahasan sudah berjalan, meskipun belum selesai.

"Sudah dibahas tapi belum selesai," tegas Saldi.

Saldi juga mengingatkan agar pemohon menyampaikan dan mengajukan setiap permintaan sesuai tahapan persidangan.

"Jadi barang-barang berat begini harus dicicil Pak Bambang, enggak boleh sekali selesai semua, oke. Oke ya," imbuhnya.

Ahli: Pelantikan Tak Hapus Persoalan Pencalonan

Persoalan lain yang mengemuka dalam persidangan adalah kewenangan MK memeriksa dugaan ketidakabsahan syarat pencalonan setelah pasangan presiden dan wakil presiden terpilih dilantik.

Ahli hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Yance Arizona, berpendapat bahwa pelantikan tidak otomatis menghapus kemungkinan koreksi terhadap persoalan yang

terjadi pada tahapan pencalonan.

Menurut dia, prinsip pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam UUD 1945 tetap menjadi dasar untuk menilai proses pemilu secara keseluruhan.

"Jadi kapan ada dugaan terkait dengan ketidakjujuran atau ketidakadilan bisa diperoleh, maka tahapan-tahapan sebelumnya itu bisa dikoreksi," kata Yance.

Ia menjelaskan, mekanisme koreksi tidak selalu harus berujung pada pemungutan suara ulang. Yance merujuk Putusan MK Nomor 45/PHPU.DVIII/2010 dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat. Saat itu, MK mendiskualifikasi pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dan memerintahkan penetapan pasangan lainnya sebagai pemenang.

Dalam penjelasan yang disampaikan di persidangan, Yance membedakan mekanisme diskualifikasi elektoral dari pemakzulan sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945. Menurut dia, apabila persoalannya terletak pada keabsahan persyaratan calon dalam pemilu, mekanisme penyelesaiannya perlu dilihat dalam kerangka perselisihan hasil pemilu.

Yance juga merujuk pengalaman di negara lain, termasuk putusan pengadilan pemilu Brasil pada 30 Juni 2023 yang menyatakan mantan Presiden Jair Bolsonaro tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu selama delapan tahun akibat pelanggaran dalam pemilu. (tin,ist,kum/dya)



DIRJENPAS MASHUDI MUNDUR BUNTUT POLEMIC KLASTER MEWAH LAPAS CIBINONG

Pengunduran diri Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi menjadi babak baru polemik fasilitas hunian mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor. Namun, mundurnya pejabat tertinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan itu belum menjawab sejumlah persoalan yang muncul, mulai dari asal-usul pembangunan klaster, status aset, dugaan perlakuan istimewa terhadap warga binaan, hingga kemungkinan penyimpangan dalam pengelolaan lapas.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Akbar Hadi, membenarkan pengunduran diri tersebut. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto telah menerima surat pengunduran diri Mashudi pada Kamis, 1 Oktober 2026.

"Hari ini Bapak Menteri Imipias telah menerima surat pengunduran diri Bapak Mashudi sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan," kata Akbar dalam keterangan tertulis, Kamis (1/10/2026).

Akbar memastikan keputusan tersebut tidak mengganggu pelayanan publik maupun pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Seluruh jajaran Ditjen Pemasyarakatan tetap bekerja sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.

"Pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan tugas fungsi pemasyarakatan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Seluruh jajaran tetap melaksanakan tugas sesuai kewenangan dan mekanisme yang telah ditetapkan," ujarnya.

Dibangun di Lahan Pemkab Bogor

Kasus ini bermula dari inspeksi mendadak Ombudsman RI pada 23 September 2026. Dalam pemeriksaan tersebut, Ombudsman menemukan fasilitas hunian dengan standar menyerupai apartemen di lingkungan Lapas Cibinong. Temuan itu memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan, keamanan, dan kemungkinan adanya perlakuan khusus terhadap warga binaan tertentu.

Polemik semakin besar setelah Kemenimipas melakukan pemeriksaan internal. Kepala Lapas Cibinong dan empat pegawai lainnya dinonaktifkan untuk kepentingan pemeriksaan. Mashudi sebelumnya juga turun langsung bersama Menteri Imipias Agus Andrianto dan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto untuk melihat fasilitas tersebut pada 25 September 2026.

Pada Senin (28/9/2026), persoalan tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI. Anggota Komisi XIII Yanuar Arif Wibowo



Kondisi bangunan hunian klaster mewah Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, usai dibongkar petugas pada Rabu (30/9/2026).dok

bahkan meminta Mashudi mundur apabila tidak sanggup membenahi tata kelola pemasyarakatan.

"Kalau Bapak enggak sanggup, bapak mundur juga," kata Yanuar dalam rapat tersebut.

Yanuar menilai Dirjenpas memiliki tanggung jawab mengawasi seluruh jajaran pemasyarakatan, termasuk melakukan rotasi dan mutasi petugas serta menerapkan sistem penghargaan dan sanksi.

"Semua ini di dalam pengawasan Pak Dirjen. Kalau Pak Dirjen enggak sanggup menata, mengawasi, melakukan reward dan punishment kepada seluruh petugas lapas, mending Bapak berhenti, biar digantikan yang lain," ujarnya.

Ia juga meminta dugaan tindak pidana dalam pemberian fasilitas kepada warga binaan ditelusuri. Menurut Yanuar, jika ditemukan unsur suap atau pemerasan, persoalan tersebut harus diproses secara hukum.

Sehari setelah RDP, Rabu (30/9/2026), Mashudi bersama Komisi XIII DPR meninjau langsung lokasi. Kemenimipas menyepakati pembongkaran bangunan yang dinilai tidak sesuai ketentuan. Sejumlah barang di dalam bangunan turut diamankan di bawah koordinasi Inspektorat Jenderal Kemenimipas untuk diperiksa lebih lanjut. Bangunan tersebut kemudian diratakan dengan tanah.

Persoalan klaster itu juga merembet pada status kepemilikan tanah. Bupati Bogor Rudy Susmanto mengungkapkan, bangunan tersebut berdiri di atas lahan milik Pemerintah Kabupaten Bogor yang dipinjamkan

kepada pihak Lapas Cibinong sejak 2023.

Menurut Rudy, permohonan penggunaan lahan diajukan pihak lapas melalui surat pada 2023. Lokasinya berada di sebelah kompleks lapas, dekat bantaran sungai. Saat itu, pihak lapas menyampaikan kebutuhan lahan untuk perluasan pelayanan warga binaan.

Namun, Rudy menyebut permohonan tersebut tidak menjelaskan secara rinci peruntukan penggunaan lahannya.

"Nah tetapi peruntukannya di 2023, peruntukannya adalah tidak disebutkan rinciannya seperti apa," kata Rudy kepada wartawan di Cibinong, Kamis (1/10/2026).

Ia menegaskan, bangunan yang dibongkar bukan merupakan aset yang dihibahkan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Pembangunannya juga tidak menggunakan anggaran pemerintah daerah.

"Bangunan-bangunan yang dibongkar kemarin tidak ada hibah dari Pemerintah Kabupaten Bogor. Kami pastikan tidak," ujarnya.

Terkait perizinan bangunan, Pemkab Bogor masih akan melakukan pemeriksaan melalui perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

"Kalau izinnya, tentu nanti kami pastikan ke Dinas Pertanahan Tata Ruang yang baru, lalu DPMPTSP, izin yang keluar apa saja," kata Rudy.

Rudy membedakan kewenangan

FAKTA- FAKTA PENGUNDURAN DIRI MASHUDI

Januari 2025:
Mashudi dilantik sebagai Dirjen Pemasyarakatan.

23 September 2026:
Ombudsman menemukan fasilitas hunian mewah di Lapas Cibinong.

25 September 2026:
Menteri Imipias dan jajaran meninjau lokasi.

28 September 2026:
Komisi XIII DPR menggelar RDP dan meminta pertanggungjawaban Dirjenpas.

30 September 2026:
DPR dan Kemenimipas meninjau lokasi; bangunan disepakati untuk dibongkar.

1 Oktober 2026:
- Bangunan telah rata dengan tanah; surat pengunduran diri Mashudi diterima Menteri Agus Andrianto.

- Status tanah:
Milik Pemkab Bogor, dipinjamkan kepada Lapas Cibinong sejak 2023.



pengelolaan lapas dengan kepemilikan tanah. Operasional dan pengelolaan Lapas Cibinong berada di bawah Kemenimipas, sedangkan Pemkab Bogor bertanggung jawab menjaga aset tanah miliknya.

"Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan," ujarnya.

Pemkab Bogor, lanjut Rudy, belum menentukan pemanfaatan lahan setelah bangunan dibongkar. Pemerintah daerah memilih menghormati proses hukum yang berjalan sekaligus memastikan aset tersebut tidak digunakan pihak yang tidak bertanggung jawab. (tin,ist,kum/dya)

Jajaki Swasta, Rehabilitasi Pasar Lawang Butuh Rp 180 Miliar

Ilustrasi: Aktivitas pedagang dan pembeli di Pasar Lawang, Kabupaten Malang. (foto: ist)



MALANG - Rehabilitasi Pasar Lawang yang terbakar pada 2019, diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp150 miliar hingga Rp180 miliar. Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang kini menjajaki kerja sama dengan pihak swasta untuk merealisasikan proyeknya.

"Kami masih berdiskusi dengan

sejumlah pihak swasta yang berpotensi terlibat dalam rehabilitasi Pasar Lawang," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Tommie Herawanto, Kamis (1/10/2026).

Disebutkannya, kebutuhan anggaran rehabilitasi Pasar Lawang saat ini diperkirakan sekitar Rp150 miliar. Namun, nilai tersebut masih dapat berubah menyesuaikan kondisi fiskal serta

perkembangan satuan harga bahan bangunan. "Tapi dengan kondisi fiskal sekarang ini, pasti ada penyesuaian dengan satuan harga (bahan bangunan)," terang Tommie.

Ia menjelaskan, rehabilitasi nantinya tidak serta-merta dilakukan dengan merobohkan seluruh bangunan lama yang tersisa pascakebakaran.

Pemkab Malang terlebih dahulu akan melihat kondisi bangunan untuk menentukan bagian yang masih dapat dipertahankan.

Bangunan yang dinilai sudah tidak memungkinkan untuk digunakan kembali akan dibongkar. Sementara bagian yang masih layak akan tetap dipertahankan dan dimanfaatkan dalam proses rehabilitasi.

Rencana rehabilitasi tersebut juga menjadi sorotan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang pada 21 dan 23 September 2026. Dalam agenda penyampaian pandangan umum terhadap RAPBD 2027, juru bicara Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Feri Andi Suseko menyinggung rencana revitalisasi Pasar Lawang melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Feri menyebut, Pasar Lawang menjadi salah satu dari 2 proyek besar yang direncanakan menggunakan skema KPBU. Proyek lainnya yakni pembangunan atau penataan Alun-Alun Kepanjen.

"Alun-Alun Kepanjen nilainya sebesar Rp764 miliar dan Pasar Lawang Rp150-180 miliar. Sejauh mana kajian rasio kemampuan membayar

ketersediaan layanan yang dievaluasi Kemendagri dan Pemprov Jatim agar skema Availability Payment (AP) tidak menjadi beban utang fiskal jangka panjang," kata Feri.

Menurut Feri, apabila menggunakan skema Availability Payment (AP), Pemkab Malang memiliki kewajiban membayarkan biaya layanan infrastruktur kepada badan usaha swasta sesuai mekanisme kerja sama yang ditetapkan.

Karena itu, ia meminta agar kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu pertimbangan utama sebelum skema tersebut diterapkan.

"Untuk mekanisme KPBU, masih perlu kajian Rasio Kemampuan Membayar Ketersediaan Layanan (RKMKL) bersama pihak terkait, termasuk memastikan kesesuaian asumsi yang digunakan dengan proyeksi pendapatan dan belanja daerah, serta kemampuan fiskal Kabupaten Malang," katanya.

Untuk diketahui, Pasar Lawang terbakar pada malam 17 April 2019. Kobaran api menghanguskan sebanyak 509 kios. Kerugian akibat kebakaran saat itu diperkirakan mencapai Rp9 miliar hingga Rp10 miliar. (Santi/Dya)

DLH Telusuri Sumber Limbah yang Diduga Cemari Sungai Brantas

MALANG - Aliran Sungai Brantas di kawasan Gang V, Kelurahan Mergosono, Kota Malang, sempat berubah warna pada Minggu (27/9/2026). Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang kini tengah menelusuri dugaan sumber limbah yang menyebabkan perubahan warna tersebut.

Plt Kepala DLH Kota Malang Gamaliel Raymond Matondang mengatakan, informasi mengenai perubahan warna air sungai diterima pihaknya pada Minggu sekitar pukul 16.00 WIB. Petugas kemudian melakukan pengecekan ke lokasi pada Senin (28/9/2026) sekitar pukul 09.00-11.00 WIB.

"Saat petugas tiba di lokasi, kondisi air Sungai Brantas telah kembali berwarna normal," ujar Raymond, ditemui di Balai Kota Malang, Kamis (1/10/2026).

Dikatakannya, dari hasil pengamatan sementara di lapangan, perubahan warna air tidak menunjukkan kondisi yang membahayakan dan secara kasat mata masih berada dalam baku mutu air.

Namun, DLH tetap mengambil sampel air untuk dilakukan pengujian di laboratorium. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi air berdasarkan parameter yang dapat diukur, bukan hanya berdasarkan pengamatan secara kasat mata. "Secara kasat mata perubahan warnanya masih dalam baku mutu air, bukan yang berbahaya. Tetapi kami tetap melaksanakan uji lab," katanya.

Hasil pengujian laboratorium diperkirakan keluar dalam waktu sekitar 14 hari. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kandungan yang membahayakan atau parameter yang tidak sesuai ketentuan, DLH akan melakukan penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui sumber yang menyebabkan perubahan warna air.

Menurut Raymond, terdapat sejumlah pabrik di sekitar lokasi. Namun, petugas belum dapat melakukan pemeriksaan langsung ke seluruh area karena akses menuju lokasi melalui jalur irigasi yang sempit.

DLH selanjutnya akan menggunakan hasil uji laboratorium sebagai dasar

untuk menentukan langkah pemeriksaan berikutnya, termasuk mendatangi sejumlah pabrik yang berada di sekitar aliran sungai. "Berdasarkan hasil uji lab, kami akan bersurat dan mengecek langsung ke beberapa pabrik di sana," jelasnya.

Salah satu aktivitas usaha yang menjadi bagian dari penelusuran adalah industri kulit yang diketahui menggunakan pewarna dalam proses operasionalnya. Namun, hingga hasil pemeriksaan laboratorium keluar, Raymond mengaku belum menyimpulkan sumber perubahan warna air berasal dari pabrik tertentu.

"Jika hasil laboratorium menunjukkan adanya indikasi pencemaran, kami akan memberikan peringatan dan melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan air limbah di lokasi yang ditelusuri," katanya.



Petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang mengambil sampel air Sungai Brantas di kawasan Mergosono untuk dilakukan uji lab kualitas air. (foto: DLH Kota Malang)

Raymond menambahkan, kewenangan terkait pengawasan tertentu terhadap industri berada di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Karena itu, DLH Kota Malang akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi apabila pemeriksaan lebih lanjut terhadap pabrik diperlukan. (Santi/Dya)

Warga Irak berkumpul di Baghdad untuk merayakan penarikan pasukan AS dan koalisi internasional pada 30 September 2026. (Anadolu via Getty Images)



KALA AS TARIK PASUKAN DARI IRAK, TRUMP ANCAM LEDAKKAN IRAN

Penarikan pasukan Amerika Serikat (AS) dari Irak bertepatan dengan memburuknya hubungan Washington dan Teheran. Di tengah berakhirnya misi militer koalisi pimpinan AS di Irak, Presiden Donald Trump justru melontarkan ancaman serangan terhadap Iran setelah jalur diplomasi kedua negara kembali menemui jalan buntu.

Situasi tersebut memperlihatkan dua perkembangan yang berlangsung bersamaan di Timur Tengah. Di satu sisi, AS mengakhiri misi koalisi internasional yang dibentuk untuk memerangi kelompok militan Islamic State (ISIS). Di sisi lain, ketegangan dengan Iran belum menunjukkan tanda mereda, bahkan diwarnai pengusiran delegasi diplomatik Teheran dari Amerika Serikat dan ancaman penggunaan kekuatan militer.

Presiden AS Donald Trump, Kamis (1/10/2026), menyatakan tengah mempertimbangkan dua pilihan dalam menghadapi Iran, yakni meningkatkan tindakan militer atau mencapai kesepakatan. Ketika ditanya wartawan mengenai langkah yang akan diambil pemerintahannya, Trump menjawab, "Mungkin akan meledakkan mereka."

"Kita harus mengambil keputusan itu: Apakah kita meledakkan mereka atau membuat kesepakatan," kata Trump.

Ia menambahkan, waktunya untuk mengambil keputusan telah tiba dan situasi akan segera berakhir dengan satu atau lain cara. Namun, Trump tidak menjelaskan secara terperinci bentuk operasi militer yang sedang dipertimbangkan maupun batas waktu pengambilan keputusan tersebut.

Delegasi Iran Diusir

Ancaman Trump muncul setelah hubungan diplomatik Washington dan Teheran kembali memburuk. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sebelumnya memerintahkan delegasi Iran yang berada di New York untuk segera meninggalkan wilayah Amerika Serikat.

Delegasi tersebut dipimpin Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, yang datang untuk menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Araghchi juga terlibat dalam komunikasi diplomatik tidak langsung dengan pemerintahan Trump.

Mengutip laporan Axios yang dilansir Anadolu Agency dan Al Arabiya, Kamis (1/10/2026), perintah Rubio disampaikan melalui misi diplomatik AS untuk PBB kepada perwakilan Iran pada Senin (28/9) malam waktu setempat.

Seorang pejabat AS yang dikutip Axios menyatakan, "Menteri Rubio mengusir delegasi Iran yang telah melebihi masa tinggal yang diizinkan. Sidang Majelis Umum PBB telah usai, jadi sudah saatnya mereka pergi."

Delegasi Iran dilaporkan meninggalkan New York menuju Doha, Qatar, pada Selasa (29/9) pukul 01.20 waktu setempat. Padahal, menurut sumber kedua yang dikutip Axios,

Araghchi semula dijadwalkan kembali ke Teheran pada Senin malam.

Namun, terdapat perbedaan keterangan mengenai kepulangan tersebut. Associated Press (AP), dalam laporan 1 Oktober 2026, menyebut pihak Iran membantah telah diusir. Teheran menyatakan kepulangan delegasi sudah direncanakan sebelumnya dan telah dikomunikasikan kepada Departemen Luar Negeri AS sejak 17 September.

Perundingan tidak langsung kedua negara sendiri belum menghasilkan kemajuan berarti. AP melaporkan pembicaraan yang dimediasi Qatar mencakup persoalan Selat Hormuz, konflik regional, dan

program nuklir Iran. Kebuntuan tersebut mempersempit ruang diplomasi ketika kedua negara masih menghadapi ketegangan militer.

Sebelumnya, Iran menyatakan telah menerima tanggapan resmi Washington atas proposal terbaru Teheran untuk menghidupkan kembali kesepakatan gencatan senjata di kawasan Teluk. Namun, isi tanggapan AS tersebut belum diungkapkan secara terbuka. Trump bahkan telah menyatakan menolak proposal itu.

Di tengah kebuntuan diplomasi, AS pada Rabu (30/9/2026) secara resmi menuntut penarikan seluruh pasukannya dari Irak. Keputusan itu mengakhiri misi militer koalisi pimpinan Washington yang telah berlangsung selama 12 tahun untuk memerangi ISIS.

Penarikan pasukan tersebut menjadi perkembangan penting dalam peta keamanan Timur Tengah. Iran, yang selama bertahun-tahun menentang keberadaan militer AS di kawasan, menyambut keputusan itu sebagai kemenangan politik dan strategis.

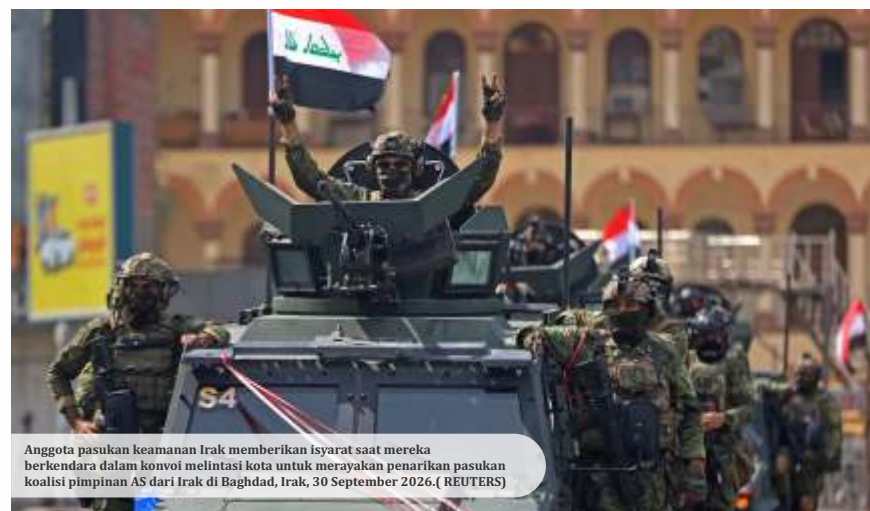
Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyampaikan ucapan selamat kepada masyarakat Irak dan kelompok-kelompok yang mereka sebut sebagai front Perlawanan Islam.

Dalam pernyataan yang dipublikasikan melalui media resmi mereka, seperti dilaporkan AFP dan dikutip detikNews, Kamis (1/10/2026), IRGC menyebut berakhirnya misi koalisi pimpinan AS sebagai "kemenangan bersejarah".

IRGC juga mendesak Washington menarik seluruh pasukannya dari Timur Tengah. Mereka menilai keberadaan militer Amerika justru memperburuk situasi keamanan di kawasan.

"AS harus meninggalkan kawasan ini dan menyerahkan pengelolaan keamanan kepada bangsa-bangsa itu sendiri," demikian pernyataan IRGC.

Mereka juga menyebut, "Dua dekade pendudukan membuktikan bahwa kehadiran AS tidak membawa keamanan; justru kehadiran itu menjadi sumber ketidakamanan, terorisme, dan ketidakstabilan di Asia Barat." (gus,ist,rtr/dya)



Makanan untuk Bantu Atasi Sembelit, dari Kiwi hingga Prune

Sembelit atau konstipasi merupakan gangguan pencernaan yang cukup umum. Kondisi ini biasanya ditandai dengan frekuensi buang air besar (BAB) kurang dari tiga kali dalam seminggu, tinja yang keras, atau kesulitan saat mengeluarkannya.

Ketika keluhan hanya terjadi sesekali, perubahan pola makan dan gaya hidup dapat membantu. Salah satu yang paling penting adalah mencukupi kebutuhan serat dan cairan. Dikutip dari The New York Times, para ahli menempatkan serat sebagai salah satu kunci untuk membantu mengatasi sembelit. Kebutuhan serat orang dewasa berada di kisaran 21-38 gram per hari, bergantung pada usia dan jenis kelamin.

Namun, istilah makanan "pembersih usus" perlu dipahami secara tepat. Makanan tidak bekerja seperti cairan pencuci yang membersihkan usus secara instan. Yang dilakukan makanan kaya serat adalah membantu membentuk tinja, mempertahankan kandungan air di dalamnya, serta mendukung pergerakan saluran pencernaan.

National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) menyebut orang dewasa umumnya membutuhkan sekitar 22-34 gram serat setiap hari. Penambahan serat sebaiknya dilakukan secara bertahap dan diikuti asupan cairan yang cukup agar tinja lebih lunak dan mudah dikeluarkan.

Apel dengan kulit

Apel merupakan salah satu buah yang bisa dimasukkan ke dalam menu harian untuk membantu memenuhi kebutuhan serat. Satu buah apel dengan kulit mengandung hampir 5 gram serat. Buah ini juga mengandung pektin, yakni jenis serat larut yang

dapat membantu membentuk konsistensi tinja. Menurut ahli gastroenterologi Mayo Clinic, Dr Arthur Beyder, kandungan tersebut dapat membantu mengatur pergerakan usus sehingga BAB lebih teratur. Kulit apel sebaiknya tidak langsung dibuang karena turut menyumbang serat. NIDDK juga memasukkan apel dengan kulit sebagai salah satu contoh buah yang kaya serat.

Kiwi

Kiwi menjadi salah satu buah yang cukup banyak diteliti dalam kaitannya dengan konstipasi. Dalam penelitian terhadap orang dewasa dengan konstipasi fungsional dan irritable bowel syndrome dengan konstipasi (IBS-C), konsumsi dua buah kiwi hijau per hari selama empat minggu dikaitkan dengan peningkatan frekuensi BAB spontan serta perbaikan kenyamanan saluran pencernaan.

Penelitian lain juga menemukan konsumsi kiwi dapat membantu mengurangi mencejan saat BAB. Studi terhadap kiwi emas menemukan konsumsi dua buah per hari memberikan hasil yang sebanding dengan asupan serat psyllium dalam parameter tertentu pada kelompok

penelitian. Namun, hasil penelitian tersebut bukan berarti kiwi merupakan obat untuk semua jenis sembelit. Tinjauan sistematis terhadap tujuh uji klinis dengan 399 peserta menyimpulkan bukti mengenai kiwi dan frekuensi BAB masih memiliki tingkat kepastian yang berbeda-beda, meski terdapat indikasi manfaat pada sejumlah gejala pencernaan.

Plum kering atau prune

Prune atau plum kering sudah lama dikenal sebagai salah satu makanan yang dapat membantu mengatasi sembelit. Ada dua komponen yang berperan, yakni serat dan sorbitol. Sorbitol merupakan gula alkohol yang memiliki efek osmotik, sehingga dapat membantu menarik air ke saluran pencernaan. Kombinasi tersebut dapat membantu membuat tinja lebih lunak dan mempermudah proses BAB.

Meski demikian, konsumsi dalam jumlah berlebihan dapat menyebabkan kembung atau diare pada sebagian orang. Karena itu, makanan yang memiliki efek pencahar tetap sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah wajar.

Sayuran berdaun hijau

Sayuran hijau seperti kale dan berbagai jenis sayuran berdaun lainnya dapat menjadi sumber serat tidak larut. Serat tidak larut membantu meningkatkan massa tinja dan mendukung pergerakannya melalui saluran pencernaan.

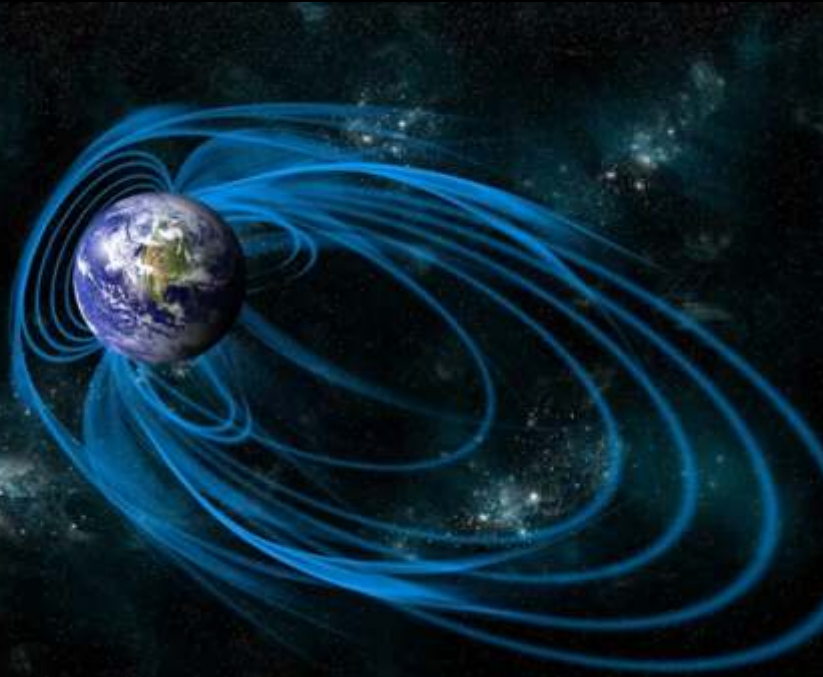
NIDDK memasukkan berbagai sayuran sebagai bagian dari sumber serat yang dapat membantu mencegah dan meredakan sembelit. Konsumsi sayuran juga dapat menjadi cara sederhana untuk meningkatkan serat tanpa harus bergantung pada suplemen.

Biji-bijian utuh

Selain buah dan sayuran, sumber serat juga bisa diperoleh dari makanan berbahan biji-bijian utuh seperti oatmeal, roti gandum utuh, pasta gandum utuh, dan produk berbasis dedak. Jenis makanan ini membantu memenuhi kebutuhan serat harian. Direkomendasikan peningkatan serat secara bertahap karena kenaikan konsumsi secara mendadak dapat membuat sebagian orang mengalami gas dan kembung. Karena itu, pola makan tinggi serat sebaiknya dibangun secara perlahan, bukan dilakukan secara ekstrem dalam waktu singkat. (far,ist/dya)



Seperti Suara Horor, Begini Bunyi Medan Magnet Bumi



Medan magnet Bumi ternyata bisa dibuat “terdengar”. Ilmuwan merekonstruksi suara dari salah satu perubahan geomagnetik paling dramatis dalam sejarah planet ini. Hasilnya terdengar seperti benda retak, bergemuruh, hingga suara benturan yang menyeramkan.

Suara tersebut bukan rekaman langsung dari 41.000 tahun lalu. Para ilmuwan menggunakan teknik sonifikasi, yakni mengubah data ilmiah menjadi representasi audio. Peristiwa yang direkonstruksi dikenal sebagai Laschamps excursion, ketika medan magnet Bumi melemah drastis sebelum akhirnya kembali ke konfigurasi normal.

Tim dari Technical University of Denmark (DTU) dan German Research Centre for Geosciences (GFZ) memanfaatkan data satelit Swarm milik European Space Agency (ESA), kemudian menggabungkannya dengan bukti perubahan medan magnet yang tersimpan dalam batuan dan sedimen.

ESA menggambarkan proses tersebut seperti menyusun musik berdasarkan sebuah partitur. Bedanya, “partitur” yang digunakan adalah data perubahan medan magnet planet selama ribuan tahun.

Agar perubahan tersebut lebih mudah dibayangkan, peneliti juga memasukkan rekaman suara alami seperti kayu berderit dan batu yang

saling bertabrakan. Hasil akhirnya berupa suara bergemuruh yang terdengar asing dan cukup mengerikan.

Di balik suara tersebut terdapat perubahan besar pada sistem perlindungan Bumi. Medan magnet planet terutama dihasilkan oleh pergerakan logam cair yang sangat panas di inti luar Bumi, sekitar 3.000 kilometer di bawah permukaan. Gerakan material tersebut menghasilkan arus listrik yang kemudian membentuk medan magnet.

magnet berfungsi sebagai perisai terhadap partikel bermuatan dan radiasi dari luar angkasa. Saat Laschamps excursion berlangsung, kekuatannya diperkirakan turun hingga sekitar 5 persen dibandingkan kondisi sekarang.

Perubahan orientasi medan magnet berlangsung sekitar 250 tahun. Setelah itu, medan magnet berada dalam konfigurasi yang tidak biasa selama sekitar 440 tahun.

Bukti dari inti es dan sedimen laut juga menunjukkan peningkatan isotop berilium-10 pada periode tersebut. Isotop ini terbentuk ketika sinar kosmik berinteraksi dengan atmosfer. Peningkatannya menjadi petunjuk bahwa lebih banyak radiasi kosmik mencapai atmosfer

Bumi. Meski demikian, rekonstruksi Laschamps bukan tanda bahwa pembalikan kutub magnet akan segera terjadi. Pembalikan kutub merupakan fenomena alami yang telah berulang kali terjadi sepanjang sejarah Bumi.

NASA mencatat 183 pembalikan medan magnet dalam 83 juta tahun terakhir, dengan jarak waktu antarperistiwa yang sangat bervariasi. Kutub magnet Bumi juga memang terus bergerak hingga sekarang.

Karena itu, suara Laschamps lebih tepat dipandang sebagai cara baru untuk memahami sejarah medan magnet Bumi. Data geologi yang sulit dibayangkan manusia diterjemahkan menjadi suara, sehingga perubahan medan magnet planet yang terjadi puluhan ribu tahun lalu dapat “didengar” kembali. (farist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN “LENTERA TODAY”
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I **SIDOARJO:** TEGUH A I **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH I **LAMONGAN:** L HANDI I **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA I **KEDIRI:** AIS I **JOMBANG :** SUTONO I **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO I **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO I **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I **TRENGGALEK:** HERLAMBAH I **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN I **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN I **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN I **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA I **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 I **TELP** 03187854491 I **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I **TELP IKLAN** 031-87854491 I **NIB** 91205006801134 I **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.



TREN FASHION YANG DOMINASI LONDON

FASHION WEEK SPRING/SUMMER 2027

London kembali menunjukkan karakter fashion yang sulit ditebak. Runway Spring/Summer 2027 tidak berjalan dalam satu estetika, melainkan mempertemukan gaya rock, romantis, tailoring, transparansi, hingga detail dekoratif yang dramatis.

Pekan mode London yang berlangsung pada September 2026 memperlihatkan bagaimana tren musim semi dan panas 2027 bergerak semakin eklektik. Ada busana dengan nuansa indie rock dan 90s, siluet yang lebih ramping, permainan bahan transparan, bahu terbuka, warna-warna pucat, hingga fringe yang memberikan gerakan pada busana.

British Vogue juga mencatat sejumlah kecenderungan kuat dari runway London, mulai dari celana thigh-tight yang melebar di bagian bawah, warna pink menyala, hingga sneakers yang kembali mendapat perhatian. Di sisi lain, street style memperlihatkan kecenderungan yang lebih personal, dengan perpaduan jeans, knitwear, tailoring, rok bermotif, dan outerwear berukuran besar.

Indie rock bersiluet ramping

Nuansa indie rock menjadi salah satu karakter yang kuat di runway London. Gaya ini tidak sekadar mengandalkan jaket kulit atau busana serba hitam. Siluetnya justru terlihat lebih ramping dan dekat dengan estetika rock era 1990-an hingga awal 2000-an.

Jaket moto, celana ketat yang melebar sedikit di bagian bawah, material kulit, dan styling yang terkesan tidak terlalu dipoles menjadi elemen penting. Salah satu siluet yang mencuri perhatian adalah celana dengan potongan sangat ramping di bagian paha kemudian melebar

mendekati pergelangan kaki. British Vogue mencatat bentuk tersebut muncul di beberapa runway SS27 dan memberikan efek berbeda ketika dikenakan karena membuat gerakan tubuh terlihat lebih tegas.

Karakter ini juga menunjukkan bahwa tren skinny belum sepenuhnya hilang. Alih-alih kembali begitu saja pada skinny jeans klasik, runway London menawarkan versi yang lebih dramatis melalui potongan flared. Untuk tampilan sehari-hari, karakter indie rock bisa diterjemahkan secara lebih sederhana melalui celana ramping, jaket kulit, kaus polos, dan sepatu berprofil rendah.

Pink menyala jadi perhatian

Jika sebelumnya warna netral dan palet gelap mendominasi banyak penampilan fashion, London SS27 justru memberikan ruang besar untuk warna yang lebih berani. Pink menyala menjadi salah satu warna yang paling mudah dikenali dari runway musim ini.

British Vogue mencatat warna pink terang muncul berulang kali di sejumlah koleksi. Warna tersebut digunakan pada jaket, dress, setelan tailoring hingga keseluruhan tampilan.

Menariknya, warna tersebut tidak selalu digunakan dengan cara feminin atau romantis. Pink dapat dipadukan dengan warna kontras sehingga menghasilkan tampilan yang lebih eksperimental. Bahkan, kombinasi warna terang dengan siluet tailoring membuat warna tersebut terasa lebih modern dan tegas.

Tren ini sejalan dengan pengamatan Forbes terhadap London Fashion Week SS27 yang melihat permainan warna sebagai salah satu kekuatan musim

tersebut. Palet runway bergerak dari warna pucat hingga warna yang lebih berani dan kombinasi yang tidak biasa. Bagi gaya sehari-hari, tidak perlu mengenakan satu set pakaian berwarna pink terang. Satu elemen seperti jaket, rok, tas atau sepatu sudah cukup menjadi aksesoris.

Transparan dan lingerie tampil berani

Permainan transparansi kembali menjadi salah satu tema besar. Namun, untuk SS27, material transparan tidak hanya digunakan sebagai lapisan tambahan yang samar. Beberapa runway justru membuatnya menjadi pusat perhatian.

Organza, lace dan bahan tipis digunakan untuk menciptakan efek berlapis. Tubuh dan pakaian dalam tidak selalu disembunyikan, tetapi menjadi bagian dari konstruksi busana. Fashionista mencatat bahwa tren underwear as outerwear terlihat cukup luas di runway London.

Tren ini memberikan dua arah styling.

Pertama, tampilan berani dengan transparansi yang menjadi pusat perhatian. Kedua, versi yang lebih wearable melalui teknik layering.

Misalnya, atasan transparan dapat dikenakan di atas tank top atau inner sederhana. Dengan begitu, karakter sheer tetap muncul tanpa membuat keseluruhan outfit terlihat terlalu terbuka.

Bahu terbuka dan siluet feminin

Bahu menjadi salah satu bagian tubuh yang kembali mendapat perhatian. Siluet off-shoulder memberikan kesan feminin tanpa harus bergantung pada rok atau dress yang sangat dekoratif.

Pada SS27, bahu terbuka hadir bersama berbagai pendekatan. Ada yang dibuat romantis dengan material lembut dan detail dekoratif, tetapi ada pula yang dipadukan dengan tailoring sehingga hasil akhirnya terasa lebih modern.

Tren tersebut menarik karena memperlihatkan pergeseran dari busana yang benar-benar membentuk tubuh menuju busana yang menonjolkan bagian tertentu. Bahu menjadi titik fokus, sementara bagian lain dapat dibuat lebih sederhana.

Gaya seperti ini juga relatif mudah diterapkan dalam busana sehari-hari. Atasan off-shoulder dapat dipadukan dengan celana berpotongan lurus atau rok panjang agar proporsi keseluruhan tetap seimbang. Untuk tampilan yang lebih kasual, siluet bahu terbuka dapat dipadukan dengan denim atau celana longgar.

Fringe pada busana

Fringe atau rumbai menjadi salah satu detail yang membuat runway London terasa lebih hidup. Tidak seperti dekorasi yang hanya dilihat ketika seseorang berdiri diam, fringe bergerak mengikuti tubuh ketika model berjalan. Efek tersebut membuat busana terlihat lebih dinamis.

Pada SS27, fringe hadir dalam berbagai karakter, mulai dari detail tipis dan halus hingga rumbai yang lebih panjang dan dramatis. Detail ini juga beririsan dengan kecenderungan bohemian yang sedang berkembang di runway. Glamour UK memasukkan fringe sebagai salah satu tren utama London Fashion Week SS27, bersamaan dengan lace, corsetry, stocking yang lebih ekspresif, dan nuansa 1990-an. (farist/dya)

Reshuffle Ketujuh Prabowo:dari Hal 1

Presiden Prabowo Subianto kembali merombak susunan menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis (1/10/2026). Perombakan kali ini menjadi reshuffle ketujuh sejak Prabowo menjabat Presiden pada Oktober 2024. Dalam setiap perombakan, sejumlah nama berganti, sebagian lainnya berpindah posisi. Namun reshuffle kali ini menyisakan pertanyaan berbeda, siapa yang benar-benar kehilangan kursi?

Tiga nama tercatat tidak lagi mendapat jabatan dalam susunan baru, yakni Pratikno, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Djamari Chaniago. Ketiganya sebelumnya menduduki posisi strategis di kabinet. Pratikno merupakan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Agus Gumiwang menjabat Menteri Perindustrian, sedangkan Djamari Chaniago merupakan Menko Politik dan Keamanan.

Berbeda dengan tiga nama tersebut, sejumlah pejabat yang kehilangan posisi lama justru hanya berpindah kursi. Sugiono, misalnya, meninggalkan jabatan Menteri Luar Negeri untuk menjadi Menko PMK. Dudung Abdurachman berpindah dari Kepala Staf Kepresidenan menjadi Menko Polkam. Sementara Listyo Sigit Prabowo meninggalkan kursi Kapolri untuk menjadi Kepala Staf Kepresidenan.

Pratikno dan Tanda Tanya Wantimpres

Pratikno menjadi nama yang masih menyimpan tanda tanya. Setelah tidak lagi menjabat Menko PMK, muncul isu bahwa mantan Menteri Sekretaris Negara itu akan mendapat tugas baru sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Pratikno tidak mengonfirmasi kabar tersebut. Seusai pelantikan pejabat di Istana Kepresidenan, Kamis, ia justru meminta publik menunggu.

"Ya nanti kan ada berita berikutnya. Nanti kan ada berita berikutnya," kata Pratikno ketika ditanya mengenai isu penugasan barunya.

Ketika ditanya apakah akan kembali ke Istana pada Jumat, 2 Oktober, Pratikno kembali tidak memberikan jawaban pasti. "Ya nanti kita tunggu lah sampai besoknya," ujarnya.

Pratikno mengatakan dirinya sempat berbicara dengan Prabowo setelah tidak lagi menjadi Menko PMK. Ia menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Presiden selama menjalankan tugas.

"Ya intinya kan saya menyampaikan terima kasih sudah diberikan kepercayaan luar biasa di bidang yang memang menjadi bidang saya, di bidang pembangunan manusia. Kami



Menko Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman (kanan) berbincang dengan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Sugiono (tengah) saat pelantikan Menteri, Wamen dan Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).ant

sampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden atas kepercayaan, mandat yang diberikan," kata Pratikno.

Kursi yang ditinggalkannya kini ditempati Sugiono. Mantan Menteri Luar Negeri itu naik menjadi Menko PMK, sementara posisi Menlu diberikan kepada diplomat karier Arrmanatha Christiawan Nasir.

Dengan demikian, keluarnya Pratikno dari kabinet belum otomatis berarti berakhirnya perannya di pemerintahan. Sampai Kamis malam, belum ada pengumuman resmi mengenai penugasan barunya. Isu Wantimpres masih sebatas informasi yang beredar dan belum dikonfirmasi Pratikno maupun Istana.

Agus Gumiwang Kehilangan Kursi

Nama kedua yang benar-benar keluar dari susunan kabinet adalah Agus Gumiwang Kartasasmita. Ia tidak lagi menjadi Menteri Perindustrian setelah posisi tersebut diberikan kepada Muhammad Sarmuji.

Sarmuji, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, sebelumnya merupakan anggota DPR. Penunjukannya menambah figur politik dalam susunan kabinet Prabowo.

Sarmuji mengungkapkan dirinya memperoleh informasi mengenai penugasan tersebut dari Sekretaris Kabinet. "Saya ditelepon Pak Seskab, ya, ada kemungkinan pokoknya urusan industri lah kira-kira begitu," kata Sarmuji.

Pergantian itu sekaligus membuat Kementerian Perindustrian memiliki nakhoda baru pada saat pemerintah tengah mendorong industrialisasi dan hilirisasi.

Djamari Juga Tak Dapat Pos Baru

Djamari Chaniago menjadi nama ketiga yang kehilangan kursi. Jabatan Menko Polkam yang sebelumnya diembannya kini diberikan kepada Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman.

Dudung sebelumnya menjabat Kepala Staf Kepresidenan. Setelah dilantik sebagai Menko Polkam, posisi

KSP kemudian diberikan kepada Listyo Sigit Prabowo.

Listyo sebelumnya merupakan Kapolri. Setelah masuk Istana sebagai KSP, kursi Kapolri diberikan kepada Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional.

Suyudi dilantik sebagai Kapolri bersama Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri.

Bahlil 2 Jabatan dan Kemenko Baru

Di antara nama-nama yang bergeser, Bahlil Lahadalia justru memperoleh posisi baru sekaligus mempertahankan kursi lamanya. Presiden Prabowo melantiknya sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, sementara ia tetap menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis. Penunjukan Bahlil sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih.

Sebelum pelantikan, Bahlil mengatakan dirinya mendapat telepon dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengenai penugasan rangkap tersebut.

"Memang saya dapat telepon dari Pak Seskab, untuk Menko merangkap Menteri ESDM. Kita jalankan semua tugas dari Bapak Presiden," kata Bahlil.

Rangkap jabatan itu bukan sekadar pergantian nama dalam struktur kabinet. Bersamaan dengan penunjukan Bahlil, pemerintah membentuk Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, sebuah pos baru yang menurut Bahlil dimaksudkan untuk mempercepat eksekusi program hilirisasi dan transisi energi.

Bahlil menjelaskan pembentukan Kemenko baru tersebut tidak terlepas dari situasi geopolitik dan ekonomi global. Di tengah ketidakpastian tersebut, kebutuhan terhadap energi bersih tetap menjadi agenda yang harus

WAJAH-WAJAH DI BALIK RESHUFFLE 1 OKTOBER

Lanjutan Dari hal 11...

MUHAMMAD FADIL IMRAN

- Baru: Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa
- Sebelumnya: Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi
- LHKPN: Rp9,96 miliar

ARYANTO WIBOWO

- Baru: Wakil Kepala BPKP
- Sebelumnya: Deputy Kepala BPKP
- LHKPN: Rp3,79 miliar*

NUZRAN JOER

- Baru: Ketua Ombudsman RI
- Sebelumnya: Anggota Ombudsman; mantan anggota DPD
- LHKPN: Rp618,32 juta (2008)

RADIAN SYAM

- Baru: Wakil Ketua Ombudsman RI
- Sebelumnya: Anggota Ombudsman; akademisi hukum
- LHKPN: Belum terverifikasi

dijalankan Indonesia.

"Kenapa ini penting, kita tahu bahwa dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu dan konstelasi dinamika ekonomi dunia juga yang menuntut untuk terjadinya energi yang bersih. Maka Bapak Presiden memandang penting untuk program-program prioritas terkait dengan hilirisasi, terkait dengan transisi energi sebagai komitmen global dari Paris Agreement," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Kamis.

Menurut Bahlil, agenda tersebut tidak bisa dikerjakan secara terpisah oleh masing-masing kementerian. Prabowo, kata dia, menginginkan hilirisasi dan transisi energi dikerjakan secara terpadu dengan target yang jelas.

"Maka ini tidak bisa dilakukan dengan cara parsial, tapi harus dilakukan dengan komprehensif, terukur, dan betul-betul dapat diwujudkan dengan target apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden," ujarnya.

Dilaporkan pembentukan Kemenko baru itu diarahkan untuk mempercepat eksekusi target hilirisasi dan transisi energi yang menjadi bagian dari agenda prioritas pemerintahan Prabowo. Bahlil mengatakan dua agenda tersebut perlu dikawal secara terintegrasi.

Dengan mandat tersebut, lingkup pekerjaan Bahlil menjadi lebih luas. Selain menangani kementerian teknis ESDM, ia mendapat fungsi koordinasi untuk agenda lintas kementerian di bidang hilirisasi dan transisi energi. (wid,ist,rls,kum,tir/dya)

SIDANG YAQUT: FEE HAJI DISEBUT UNTUK RENCANA TAKE OVER PKB DARI CAK IMIN

Sidang perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (1/10/2026), mengungkapkan informasi tentang dugaan rencana mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menggunakan uang fee percepatan haji untuk mengambil alih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

KASUS KORUPSI TATA KELOLA MBG

USD4.000/JEMAAH

Commitment fee kuota haji khusus disebut mencapai USD4.000

USD500 DIPOTONG

Pengembalian dana kepada PIHK disebut dipotong USD500 untuk operasional.

USD100 RIBU DIPINJAM

Gus Alex disebut pernah meminjam USD100.000 dan telah dikembalikan.

"THR" PEJABAT KEMENAG

BAP menyebut Rp500 ribu untuk OB dan Rp2,5 juta untuk Kasubdit.

Rp100 JUTA

Ahmad Taufik mengaku memberi Agus Syafi'i, disebut sebagai THR dan ucapan terima kasih.

Rp15 JUTA APRESIASI

Kesthuri disebut memberi Abdul Muhyi setelah musim haji.

USD3.000/JEMAAH

Fee percepatan kuota tambahan 2024 disebut mencapai USD3.000.

USD67 RIBU

Juahir mengaku pernah menerima uang dari perwakilan PIHK.

USD110 RIBU

Uang tunai yang disita dari Ahmad Taufik diperlihatkan di persidangan.

Rp500 JUTA

Budi Darmawan disebut menyetorkan dana ke rekening penampungan KPK.

Rp622,09 MILIAR

KPK mendakwa kerugian negara sekitar Rp622,09 miliar, termasuk fee percepatan sekitar Rp143,92 miliar.



Terdakwa kasus dugaan korupsi pembagian kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024, Yaqut Cholil Qoumas menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (1/10/2026). (antara)

Dalam BAP yang dibacakan jaksa, disebutkan uang yang diberikan kepada mantan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, diduga akan digunakan Yaqut untuk kepentingan pribadi, termasuk mengambil alih PKB. Rencana itu disebut tidak terlaksana karena perubahan peta politik.

"Sepemahaman saya, pemberian uang kepada Isfah Abidal Aziz digunakan oleh Saudara Yaqut Cholil Qoumas untuk kepentingan pribadi Yaqut Cholil Qoumas. Di antaranya untuk take over Partai PKB. Namun pada akhirnya tidak jadi dilakukan karena perubahan peta politik," kata jaksa saat membacakan BAP Taufik.

Namun, keterangan tersebut segera diberi batas oleh Taufik. Ia mengatakan informasi mengenai rencana pengambilalihan PKB bukan berasal dari pengetahuannya secara langsung, melainkan cerita yang pernah didengarnya dari Muhammad Agus Syafi'i, mantan Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus Kementerian Agama.

"Saya dengar dari Pak Agus, Pak," ujar Taufik.

Ketika jaksa kembali meminta penjelasan, Taufik bahkan meminta arahan majelis hakim apakah informasi tersebut harus disampaikan. Ketua majelis hakim Ni Kadek Susantiani kemudian meminta Taufik menjawab pertanyaan jaksa.

Taufik menegaskan dirinya tidak mengetahui apakah Yaqut benar-benar merencanakan penggunaan uang

tersebut untuk mengambil alih PKB.

"Saya cuma mendengar, Yang Mulia," katanya.

Ia juga mempersoalkan rumusan keterangannya dalam BAP. Menurut Taufik, ketika diperiksa penyidik, dirinya sudah menjelaskan bahwa informasi itu hanya didengar dari Agus Syafi'i, bukan sesuatu yang dia ketahui atau saksikan sendiri.

"Tapi tidak serta-merta itu dilakukan oleh Gus Yaqut, gitu, Pak. Tapi Pak Agus pernah cerita gitu seperti itu. 'Saya cuma mendengar,' saya bilang," ujar Taufik.

Hakim kemudian memastikan kembali sumber informasi tersebut. Taufik menjawab bahwa cerita itu memang berasal dari Agus Syafi'i.

"Iya, itu yang ditulisnya 'sepemahaman saya,' padahal saya itu cuma mendengar, Yang Mulia," kata Taufik.

Jaksa kemudian kembali membacakan isi BAP tersebut. Taufik mengakui pernah mendengar informasi mengenai rencana tersebut, tetapi tidak dapat memastikan kebenarannya.

"Saya dengar seperti itu, Yang Mulia," ujarnya.

Fee Percepatan USD4.000/Jemaah

Kesaksian mengenai dugaan penggunaan uang untuk kepentingan pribadi itu muncul dalam rangkaian pemeriksaan Taufik mengenai mekanisme pengumpulan fee dari penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK).

Dalam persidangan yang sama, Taufik mengungkapkan adanya commitment fee sebesar USD4.000 per jemaah bagi jemaah yang menggunakan kuota tambahan haji 2024. Uang tersebut dikumpulkan melalui PIHK dan kemudian disimpan di Cervino Village Apartment. Taufik memperkirakan jumlah jemaah yang terkait pungutan itu sekitar 690–695 orang.

"4.000 USD," kata Taufik ketika mengonfirmasi besaran commitment fee kepada jaksa.

Ketika ditanya apakah seluruh uang tersebut telah dikembalikan, Taufik menjawab, "Sudah, Pak."

Menurut keterangan Taufik, pengembalian dilakukan sekitar Juli 2024 setelah isu Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI mencuat. Uang dikembalikan kepada PIHK, tetapi dipotong USD500 untuk biaya operasional.

PIHK yang berada di wilayah Jabodetabek menerima pengembalian secara langsung. Sementara PIHK di luar Jabodetabek menerima uang tersebut ketika evaluasi haji 2024 di Hotel Grand Mercure, Sleman, Yogyakarta.

"Namun uang yang dikembalikan telah dipotong sebesar USD500 untuk operasional," demikian keterangan Taufik yang dibacakan jaksa dan kemudian dibenarkan saksi.

Taufik juga mengaku pernah mengetahui adanya peminjaman uang sebesar USD100 ribu kepada Gus Alex melalui Budi Darmawan, yang saat itu menjabat Ketua Himpun.

Menurut Taufik, uang tersebut dipinjam atas nama Gus Alex. Ia mengatakan permintaan awal disampaikan Agus Syafi'i ketika dirinya masih berada di Tanah Suci untuk umrah.

"Waktu itu seingat saya, saya masih umrah. Kemudian Pak Agus minta eh minjam uang 100 ribu, Pak," kata Taufik.

Ia kemudian menyampaikan permintaan tersebut kepada Budi Darmawan. Setelah kembali dari umrah, Taufik meminta Agus mengembalikan uang tersebut.

Taufik mengaku uang itu akhirnya dikembalikan. Ia juga menyebut pernah mendengar bahwa uang tersebut berkaitan dengan Pansus Haji, meski keterangan itu juga bukan berdasarkan pengetahuannya langsung.

Sidang juga mengungkap pola pemberian uang kepada sejumlah pegawai Kemenag. Taufik menyebut adanya kebiasaan memberikan "THR" kepada pejabat dan staf Kemenag setiap bulan Ramadan.

Menurut Taufik, tidak ada nominal yang secara resmi ditentukan Kemenag. Besarannya ditentukan berdasarkan hierarki jabatan. (tin,ist,kcm,ant/dya)

Informasi itu muncul ketika jaksa penuntut umum (JPU) KPK mengonfirmasi berita acara pemeriksaan (BAP) Ahmad Taufik, Direktur PT Anugerah Citra Mulia sekaligus pengurus Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus (HIMPUH).